

**NASKAH PUBLIKASI**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM 1000 GURU BERPRESTASI  
OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TANAH BUMBU  
TAHUN 2017-2018**



**Mengetahui,**

**Dean Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**

**Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.**  
NIK : 19690822199603 163 038

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**  
NIK : 19660828199403 163 025

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM 1000 GURU  
BERPRESTASI OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN TANAH BUMBU TAHUN 2017-2018**

Ilham Bahari

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

[ilhambahari777@gmail.com](mailto:ilhambahari777@gmail.com)

**ABSTRAK**

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki program yang bernama “1000 Guru Berprestasi”. Program yang dimulai sejak tahun 2017 ini merupakan program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016. Disamping itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik yang akan berimplikasi kepada prestasi siswa didik dari tingkat SD hingga SMP.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017-2018 dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini akan menjelaskan berbagai poin indikator secara detail mengenai implementasi program 1000 guru berprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tanah Bumbu tahun 2017-2018.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti memperoleh temuan bahwa program 1000 guru berprestasi ini berhasil memberikan warna baru dalam dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, program ini telah memberikan banyak manfaat positif bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru hingga siswa.

**Keyword :** Pendidikan, Guru, Program 1000 Guru Berprestasi, Implementasi Kebijakan.

## **PENDAHULUAN**

Tanah Bumbu merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan umurnya yang baru menginjak 16 tahun, kini Kabupaten Tanah Bumbu mulai konsen dalam memperbaiki daerahnya, dimana salah satu fokus utamanya adalah dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Keseriusan dalam memperbaiki kualitas pendidikan terbukti dalam visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 yang berbunyi “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing”. Visi tersebut sejatinya adalah suatu upaya nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang akan berimplikasi pada SDM yang berdaya saing.

Dalam mencetak SDM yang berdaya saing tentu perlu dipersiapkan sejak dini. Salah satu upayanya adalah dengan menghadirkan kurikulum yang baik serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi guru dan siswa. Disamping itu adanya dukungan dari seluruh pihak, khususnya dukungan dari pemerintah daerah akan menjadi tambahan kekuatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan sehingga akan menghadirkan generasi baru yang berdaya saing.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu menghadirkan program yang bernama “1000 Guru Berprestasi”. Program yang dimulai sejak 2017 ini merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor

12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.

Program ini ditujukan kepada pendidik (guru) dari jenjang SD hingga SMP dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar kepada siswa. Guru yang berprestasi akan diseleksi dan kemudian didiklatkan selama satu bulan di Surya Institute Tangerang, dengan dana yang bersumber dari APBD dan CSR. Indikator terukur keberhasilan program ini adalah dengan meningkatnya keikutsertaan dan perolehan juara oleh pelajar (SD dan SMP) Tanah Bumbu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) baik dalam kancah Provinsi maupun Nasional (wawancara dengan Suharyono, S, Pd Kepala Seksi Pengembangan PTK).

Sebelum diimplementasikannya program 1000 Guru Berprestasi pada tahun 2016, medali OSN yang diperoleh siswa SD se-Kabupaten Tanah Bumbu baik tingkat provinsi maupun nasional adalah nihil alias 0. Namun setelah program ini diimplementasikan pada tahun 2017 keberhasilannya mulai terasa, yakni medali yang didapat dari OSN tingkat provinsi berjumlah 3 dan nasional 0. Sedangkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan, yakni Tanah Bumbu mendapat 3 medali untuk provinsi dan 0 untuk nasional. Sementara itu, jumlah medali yang diperoleh siswa SMP se-Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2016, yakni 2 untuk tingkat provinsi dan nasional 0. Angka ini juga meningkat pada tahun 2017, dimana untuk OSN jumlah juara yang diperoleh siswa SMP tingkat provinsi 2 dan nasional 0. Sedangkan peningkatan juga terjadi pada tahun 2018, yakni 3 provinsi dan 0 nasional. (Laporan Kejuaraan OSN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017).

Dapat kita simpulkan dari data diatas, sejak berjalannya program ini keikutsertaan maupun juara yang diperoleh siswa SD dan SMP dalam kejuaraan OSN semakin meningkat setiap tahunnya. Tentunya hal ini merupakan pencapaian positif dan harapan baru bagi dunia Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara logis juga kita katakan bahwa program 1000 guru berprestasi ini mampu memberikan warna baru dalam dunia pendidikan di kabupaten Tanah Bumbu dan harapannya program ini dapat sebagai *role model* dalam meningkatkan kualitas Pendidikan yang berimplikasi pada hadirnya SDM yang berdaya saing diIndonesia. Atas alasan dan pertimbangan tersebut maka penulis memilih lokasi penelitian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu dengan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Program 1000 Guru Berprestasi Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu Tahun 2017-2018”.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Kebijakan Publik**

(James, 1997) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Untuk melengkapi pendapat Anderson, Edward III dan Ira Sharkansky dalam (Islamy, 2016) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau juga dalam *policy statement* yang berbentuk wacana atau pidato yang diungkapkan oleh pejabat politik maupun pemerintahan yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

(Thoha, 2010) menjelaskan ada lima proses yang ada dalam kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Identifikasi Masalah, dimana disini ada tuntutan dari masyarakat yang diberikan kepada pemerintah
- b. Perumusan Kebijakan, dalam perumusan kebijakan pemerintah akan mengagregasi usulan maupun tuntutan darimasyarakat

- c. Pengesahan Kebijakan, Setelah dirumuskan maka pemerintah akan menetapkan dan mengesahkan kebijakan itu sebagai undang-undang yang memiliki legalitas secara hukum
- d. Implementasi Kebijakan, disini akan ada penataan birokrasi, penyediaan anggaran dan lain-lain dalam rangka mendukung berjalannya suatu kebijakan
- e. Evaluasi Kebijakan, melakukan penilaian dan menyarankan perubahan terhadap suatu kebijakan jika diperlukan.

## **2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanya menjadi sebuah dokumen yang tidak bermakna. Banyak kebijakan baik yang dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan oleh tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri, namun kemudian tidak memberikan dampak apapun dikarenakan dalam kehidupan dikarenakan tidak mampu maupun tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai tahap yang sangat penting dalam suatu proses kebijakan publik. Setiap program harus diimplementasikan agar dapat memiliki dampak dan tujuan yang diharapkan. Implementasi kebijakan juga dapat dipandang dalam pengertian yang luas, yaitu dapat diartikan sebagai tahapan lanjutan setelah undang-undang ditetapkan, dimana aktor, prosedur, organisasi dan teknik bekerja secara bersama untuk menjalankan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program (Winarno, 2014).

Sementara itu, menurut (Grindle, 1980) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi (*contents*) dan lingkungan (*konteks*). Kemudian Grindle mengatakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk kaitan (*linkage*) sehingga memudahkan dalam merealisasikan suatu tujuan yang diharapkan. Setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dapat dilakukan. Namun hal ini tidak selalu berjalan dengan baik, tergantung kepada kemampuan pelaksana program. Pada akhirnya implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh dua hal, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan itu sendiri.

a. Kontek isi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan berbeda akan lebih sulit diimplementasikan daripada yang menyangkut sedikit kepentingan

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang dapat langsung dirasakan kebermanfaatannya oleh sasaran, maka akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Jika dampak dari kebijakan dapat memberikan manfaat dengan jelas, maka kebijakan tersebut akan lebih mudah diimplementasikan. Hal ini berbeda jika bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku oleh penerima kebijakan.

4. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan, maka indikator ini akan menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program 1000 guru berprestasi, namun pertanyaannya apakah letak program tersebut sudah tepat berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

5. Siapa pelaksana program

Dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan harus didukung dengan pelaksana kebijakan yang berkompeten demi keberhasilan program tersebut.

## 6. Sumber daya yang dikerahkan

Sumber daya baik bentuk, jumlah maupun asal yang digunakan dalam program akan menentukan keberhasilan program.

- b. Sedangkan konteks implementasi kebijakan diantaranya:
  1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
  2. Karakteristik lembaga dan penguasa
  3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

### **3. Kebijakan Pendidikan**

(Tilaar, 2008) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai segala proses dan hasil perumusan langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan menurut Chon dalam (Saputra & Junaidi, 2011) kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan keadaan dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perlu untuk diketahui. Jadi dalam pengertian ini dapat dijelaskan lebih jauh apakah fasilitas pembelajaran sudah memadai, anggaran untuk pembelajaran dan kualifikasi pendidikan guru memenuhi syarat.

### **DEFINISI OPERASIONAL**

#### **1. Implementasi Kebijakan**

Ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu konteks isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.

a. Konteks isi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Siapa pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

b. Sedangkan konteks implementasi kebijakan diantaranya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana

## **PEMBAHASAN**

Grindle dalam buku *Politics and Policy Implementation In the Third World*, mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu konteks isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan.

### **1. Konteks Isi Kebijakan**

#### **1.1 Kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan**

Program 1000 guru berprestasi ini mendapat dukungan penuh dan telah menjadi salah satu program prioritas pemkab Tanah Bumbu. Disisi lain, pemkab Tanah Bumbu memahami bahwa program tersebut tidak akan berjalan baik tanpa merangkul pihak swasta dalam rangka menjalankan prinsip *good governance*. Menyadari adanya suatu peluang, maka pemkab Tanah Bumbu menggandeng pihak swasta untuk mendukung berjalannya program tersebut. Dilain sisi, tingginya dukungan moral maupun material

yang diberikani pihak swasta dalam mendukung berjalannya program tersebut, maka beberapa perusahaan swasta memberikan bantuan dana sebagai bentuk CSR dalam mendukung program tersebut. Berikut adalah jumlah dana csr yang diberikan pihak swasta dalam mendukung implementasi program 1000 guru berprestasi pada tahun 2017-2018.

**Tabel 1**

**Jumlah CSR Tahun 2017 & 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah CSR yang Diterima</b>
2017	Rp. 180.000.000
2018	Rp. 70.000.000

Sumber : Laporan CSR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu 2018

Dari jumlah csr yang diberikan pihak swasta untuk mendukung implementasi program tersebut, pihak swasta tidak meminta imbalan apapun. Dalam arti, csr yang diberikan pihak swasta adalah untuk kepentingan memperbaiki kualitas pendidikan daerah Tanah Bumbu. Pernyataan ini senada dengan pernyataan Bapak Suharyono berikut ini :

“Alhamdulillah mas, swasta disini sangat mendukung adanya program-program yang tujuannya membantu meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tanah Bumbu. Terkait program 1000 guru berprestasi ini kami dudukung dengan beberapa perusahaan swasta, seperti PT Jhonlin, PT Buma, SDJ dan TBR, Bank Kalsel dan lain-lain. Mereka sama sekali tidak meminta imbalan apapun, namun kami dari dinas pendidikan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi”. (Wawancara dengan Bapak Suharyono, M.Pd selaku Kepala Seksi Pengembangan PTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu, pada 7 mei 2019).

Senada dengan yang dikatakan Bapak Suharyono, Bapak Khalid juga mengatakan hal berikut ini;

“kami percaya bahwa sektor pendidikan merupakan investasi sosial yang akan menentukan masa depan bangsa. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu kami tidak bisa berdiam diri dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Selain sebagai bentuk kepedulian kami terhadap dunia pendidikan, bantuan csr yang kami berikan juga bentuk dari implementasi PP No 47 Tahun 2012 tentang tanggungjawab sosial dan dan lingkungan”. (Wawancara dengan Bapak Ali Khalid Atmanegara, ST, selaku Humas PT. Jhonlin Group, pada Rabu 29 Mei 2019).

Pernyataan tersebut semakin menguatkan bahwa dalam konteks pembuatan dan implementasi program 1000 guru berprestasi tersebut, kebijakan dan implementasi program murni dipengaruhi dari kepentingan pemerintah yang melihat adanya problematika kualitas pendidikan di Tanah Bumbu.

## **1.2 Jenis Manfaat yang Dihasilkan**

Dalam setiap kebijakan tentu harus membawa dampak positif dari suatu kebijakan. Masyarakat menyadari bahwa sebelum adanya program 1000 guru berprestasi kabupaten Tanah Bumbu cukup tertinggal dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan hadirnya program ini tentu akan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik siswa-siswi Tanah Bumbu. Disisi lain program ini tentu memberikan manfaat bagi para guru (pendidik) untuk memperbaiki kualitas model pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Artinya akan ada *multiplier effect* Pernyataan ini senada dengan pernyataan Bapak Abdul Latief berikut ini :

“Kami mewajibkan bahwa bagi peserta (guru) yang telah didiklatkan harus menyalurkan ilmunya minimal kepada 3 guru dan 5 peserta didik. Tentu masyarakat sangat *welcome* dengan adanya program ini mas, banyak yang

mendukung lantaran nilai akademik maupun non akademik anak-anak mereka mengalami peningkatan. Sejak awal program ini dicetuskan, PGRI Tanah Bumbu juga mendukung penuh”. (Wawancara dengan Bapak Drs. Abdul Latief selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu, pada 7 Mei 2019).

Manfaat yang dihasilkan dari program tersebut tentu akan dirasakan oleh seluruh aktor yang menjadi target dari program 1000 guru berprestasi ini.

### **1.3 Derajat Perubahan yang Diinginkan**

Program 1000 guru berprestasi bermula dari latarbelakang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Tanah bumbu yang cukup tertinggal dari daerah lain. Maka lahirnya program 1000 guru berprestasi ini telah memiliki target yang jelas dalam mendukung keberhasilan program serta memiliki derajat perubahan yang jelas pula. Didalam program tersebut dinas pendidikan dan kebudayaan membagi dua indikator keberhasilan program sebagai suatu target dalam rangka mencapai suatu perubahan yang diinginkan, yakni indikator terukur dan indikator tidak terukur.

#### **1. Indikator terukur**

Meningkatnya kualitas dan kuantitas siswa-siswi tanah bumbu dalam mengikuti kompetisi OSN baik dalam kancah provinsi maupun nasional

#### **2. Indikator tidak terukur**

- a. Meningkatnya partisipasi pendidik (guru) dalam mengikuti seleksi program 1000 guru berprestasi
- b. Meningkatnya motivasi siswa untuk berprestasi baik secara akademik maupun non akademik

### **1.4 Letak Pengambilan Keputusan**

Dalam hal ini yang diberikan amanah untuk mengimplementasikan program 1000 guru berprestasi adalah dinas pendidikan dan kebudayaan yang

bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati Tanah Bumbu. Keputusan ini tentu relevan dengan fungsi dan tugas yang dimiliki oleh dinas pendidikan dan kebudayaan. Sehingga adanya relevansi antara fungsi dan tugas maka akan memudahkan terimplementasinya suatu program.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025, kedudukan dinas pendidikan dan kebudayaan Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggungjawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

### **1.5 Siapa Pelaksana Program**

Dalam menjalankan program 1000 guru berprestasi, Dinas Pendidikan dan kebudayaan melalui seksi pengembangan pendidik dan tenaga pendidik (PTK) menjadi penanggungjawab utama terhadap keberhasilan program tersebut. Jalur koordinasi para implementator program tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini;

**Gambar 1**

**Jalur Koordinasi Implementator Program 1000 Guru Berprestasi**



Sumber : Diolah oleh Penulis (2019)

## 1.6 Sumber Daya yang Dikerahkan

### 1.6.1 Sumber Daya Manusia

Dalam konteks sumber daya manusia, telah dijelaskan pada deskripsi diatas bahwa SDM yang terlibat merupakan implementator yang tepat. Disamping itu, SDM yang terlibat memiliki jalur koordinasi serta sinergitas yang jelas dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

### 1.6.2 Sumber Daya Anggaran (Pendanaan)

Dalam sumber daya anggaran program (pendanaan), dapat dikatakan pada awal program ini diimplementasikan yakni 2017, anggaran yang bersumber dari APBD belum dapat mendukung program secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari target pemkab yang tidak tercapai pada tahun pertama saat program tersebut berjalan. Pemkab Tanah Bumbu menargetkan memberangkatkan 200 guru setiap tahunnya untuk didiklatkan di Surya Institute Tangerang selama 4 minggu dengan biaya sebesar Rp.25.000.000 per peserta (termasuk akomodasi dan diklat). Namun Pemkab Tanah Bumbu melalui dinas pendidikan dan kebudayaan pada tahun pertama implementasi program baru dapat memberangkatkan sebanyak 110 guru dengan pengeluaran dana APBD sebesar Rp.2.670.000.000.

### 1.6.3 Sumber Daya Pendukung Lain

Sementara itu, sumber daya pendukung lain adalah dari pihak swasta, yakni Surya Institute Tangerang sebagai aktor yang melakukan pendidikan dan latihan (diklat) kepada para guru berprestasi. Pada dasarnya surya institute Tangerang telah menjadi *partner* Pemkab Tanah Bumbu khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan sejak lama. Sebelum adanya program 1000 guru berprestasi, yang didiklatkan adalah siswa-siswi terpilih yang juga dipilih melalui seleksi yang cukup ketat. Namun melihat hasil yang kurang memuaskan, seperti anggaran yang lebih besar serta ilmu yang sukar untuk ditularkan. Maka Pemkab Tanah Bumbu berinisiasi membuat program 1000 guru

berprestasi yang dipercaya dapat meminimalisir anggaran serta dapat memberikan *multiplier effect*, seperti guru yang akan menyalurkan ilmu hasil diklat kepada para muridnya.

## **2. Konteks Lingkungan Implementasi**

### **2.1 Kekuasaan, kepentingan dan Strategi Aktor**

#### 2.1.1 Kekuasaan

Sejak awal diluncurkannya program 1000 guru berprestasi ini, pemda Tanah Bumbu telah menjadikan program ini sebagai program prioritas untuk mendukung tri dharma pembangunan Pemkab Tanah Bumbu (Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan). Pernyataan ini senada dengan yang dikatakan Bapak Abdul Latief berikut ini;

“Bupati Tanah Bumbu memiliki *Grand Design* yang bernama Tri Dharma Pembangunan yang terdiri dari Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan, dimana program ini adalah untuk mendukung hal tersebut. Dan kami pun optimis dan percaya, ini merupakan terobosan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan kita”. (Wawancara dengan Bapak Abdul Latief selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Bumbu, pada 23 Mei 2019).

#### 2.1.2 Kepentingan

Dalam konteks kepentingan, sejak awal program ini diimplementasikan tahun 2017, program 1000 guru berprestasi telah menjadi harapan baru atas perbaikan kualitas pendidikan di Tanah Bumbu yang sebelumnya cukup tertinggal. Program ini merupakan program inisiasi Pemkab Tanah Bumbu yang murni diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Tentunya dalam program ini Pemkab Tanah Bumbu didukung oleh pihak swasta dan masyarakat Tanah Bumbu. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Bapak Roswandi Salem berikut ini :

“Kebijakan 1000 guru berprestasi murni dari pemerintah yang melihat kondisi pendidikan di kabupaten Tanah Bumbu mas, pihak swasta hanya membantu dalam perihal dana saja. Ya ini baik, berarti mereka ikut peduli mas. Disisi lain masyarakat sangat mendukung, karena anak-anak mereka mendapat wawasan baru dari guru yang telah didiklatkan”. (Wawancara dengan Bapak Roswani Salem M.Sos., MM, selaku Sekretaris Daerah kabupaten Tanah Bumbu, pada 6 Mei 2019)

### 2.1.3 Strategi Aktor

Kemudian dalam konteks strategi aktor, para aktor terkait sebagai pemangku kepentingan (*stake holder*) menyadari akan pentingnya program ini bagi perbaikan pendidikan daerah. Sehingga para pemangku kepentingan memulai dengan sinergitas serta koordinasi yang baik. Koordinasi ini dimulai dari Bupati (melalui Sekda), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta Seksi Pengemebangan PTK.

## 2.2 Karakteristik Lembaga Penguasa

Karakter suatu Lembaga/organisasi yang mampu mendukung, baik secara sumber daya manusia, sumber pendanaan ataupun sumberdaya lainnya akan mempengaruhi keberhasilan dari implementasi program 1000 guru berprestasi. Lembaga-lembaga yang terkait adalah sebagai berikut ;

### 1. Bupati Tanah Bumbu

Bupati sebagai pemimpin nomor wahid di kabupaten Tanah Bumbu adalah aktor yang memiliki peran sentral dalam keberhasilan program tersebut. Hingga saat ini bupati Tanah Bumbu melalui sekda sangat konsentrasi dan mendukung adanya program ini dan menjadikannya program ini sebagai program prioritas. Bentuk dari dukungan tersebut terlihat dari koordinasi yang baik yang dilakukan dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Tanah Bumbu.

## 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga kedua adalah dinas pendidikan sebagai implementator program tersebut. Dukungan dinas pendidikan dapat dilihat dari terbukanya dinas pendidikan terhadap suatu perubahan yang mengarah kepada sebuah perbaikan. Misalnya, sebelum program 1000 guru berprestasi dicetuskan, yang didiklatkan adalah para siswa-siswa terpilih. Namun setelah dievaluasi dan ditemukan suatu permasalahan, seperti anggaran yang membengkak, serta ilmu yang kurang tersalurkan. Maka dinas pendidikan terbuka dengan perubahan dan kembali mengimplementasikan sebuah kebijakan yang kebermanfaatannya lebih dirasakan seluruh elemen masyarakat.

## 3. Swasta

Lembaga ketiga adalah swasta, hadirnya swasta disuatu daerah tentu dapat memberikan pengaruh baik maupun buruk. Namun dalam konteks implementasi program 1000 guru berprestasi ini, sangat banyak dari pihak swasta yang memberikan dukungan dana csr mereka demi kelancaran implementasi program tersebut. Para pihak swasta tersebut ialah Bank Kalsel, Jhonlin Group, Borneo Indo Bara, SDJ Group TBR dan PT Buma dengan jumlah csr pada tahun 2017 sebesar Rp. 180.000.000 dan 2018 sebesar Rp. 70.000.000.

## 4. Surya Institute Tangerang

Lembaga terakhir yang berpengaruh terhadap implementasi program ini adalah surya institute sebagai pelaksana diklat. Surya institute sendiri telah dipandang sebagai Lembaga yang konsen dan *kompetible* dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia. Maka dengan adanya kerjasama antara pemda Tanah Bumbu dengan Surya Institute adalah suatu kerjasama yang tepat dan hasil atas keberhasilan program juga telah dirasakan masyarakat Tanah Bumbu.

### **2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Implementator program 1000 guru berprestasi sendiri adalah dinas pendidikan dan kebudayaan melalui seksi pengembangan pendidik dan tenaga pendidik (PTK). Dimana dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dinas pendidikan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tanah Bumbu.

Hingga memasuki tahun ketiga program ini diimplementasikan, kepatuhan dan daya tanggap para implementator cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil implementasi program yang dirasakan kebermanfaatannya serta dirasakan derajat perubahannya. Disamping itu juga dapat dilihat dari koordinasi dan masukan-masukan yang diberikan dari bupati Tanah Bumbu dapat dipatuhi oleh kepada dinas pendidikan dan kebudayaan.

## **KESIMPULAN**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi program 1000 guru berprestasi pada tahun 2017-2018 telah berjalan dengan baik. Adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, guru serta didukung dengan anggaran dana yang cukup membuat program ini dirasakan manfaat serta derajat perubahannya. Manfaat dari program ini terbukti telah meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejuaraan OSN yang didapat pada tingkat provinsi. Selain itu, implementasi program ini telah memberikan dampak positif ganda (*multiplier effect*) untuk berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, guru dan masyarakat.

## **SARAN**

1. Perlunya konsistensi dan transparansi anggaran
2. Perlunya kerjasama dengan Perguruan Tinggi
3. Pemberian jadwal pasti terhadap implementasi program
4. Pelibatan guru dalam pembuatan program maupun dalam pengambilan kebijakan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dye. (2005). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Grindle, M. (1980). *Politics and Policy Implementation In the Third World*. New Jersey: Prencinton University Press.
- Hanifah, & Jusuf, M. (1994). *Manajemen Mutu Terpadu*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imran, A. (1999). *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- James, A. (1997). *Public Policy Making Third Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Kusumawati, H. (2010). *Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi APBD untuk Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Repositori UMY.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1995). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Nugraha, R. (2004). *No Title Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Elex Media.
- Ripley, & Franklin. (1990). *Congress, the Bureaucracy, and Public Policy*. USA: Paperback.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Permada Media Group.
- Tilaar, H. A. . (2008). *Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. (1997). *Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.
- Zainal, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

### **Jurnal**

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 55–63.
- Asmawi, A., Sjoraida, D. F., & Anwar, R. K. (2017). Masalah Dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik Tentang Transportasi Kajian Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Awing Asmawi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, 205–218.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Damarika, A. (2016). *Efektifitas Program Siswa Pintar Warga Sukowati (SINTAWATI) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Sragen 2013-2014*. Yogyakarta: Repositori UMY.
- Dwi,N. (2010). *Konsep Tajdid Muhammadiyah dalam Meningkatkan kualitas pendidikan (SK: Implementasi di SMK Muhammadiyah Karangmojo)*.

Yogyakarta: Repositori UMY.

Fitrianto, B. (2010). *Analisis kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Negeri & Swasta di Kota Yogyakarta 2006-2008*. Yogyakarta: Repositori UMY.

**Sumber Undang-Undang, Dokumen dan Lainnya**

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja  
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Perda RTRW 2017-2035 Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional